
Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020

Axelliana Muara Setyanti^{1*}, Firdaus Finuliyah²

^{1,2}*Universitas Brawijaya Malang*

*Email Korespondensi: axellinamuara@ub.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 membawa berbagai dampak pada perekonomian nasional, termasuk peningkatan pada pengangguran terdidik. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak serta merta menghindarkan angkatan kerja terdidik dari kesulitan memperoleh pekerjaan maupun pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi, ditunjukkan oleh peningkatan pengangguran terdidik dari 6,69% pada tahun 2020 menjadi 8,55% pada 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangguran terdidik di Indonesia berdasarkan provinsi, tingkat pendidikan, alasan berhenti bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan secara deskriptif, serta menganalisis probabilitas terjadinya pengangguran terdidik di Indonesia melalui metode regresi logistik menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020. Penelitian ini menemukan secara nasional, pengangguran terdidik lulusan universitas (S1-S3) ditemukan berjumlah lebih tinggi (65,54%) dibandingkan lulusan diploma (34,46%). Provinsi dengan tingkat pengangguran terdidik yang paling tinggi adalah Jawa Barat, sebesar 32,0% dari total angkatan kerja terdidik di Jawa Barat. Alasan berhenti bekerja didominasi oleh alasan dampak pandemi (23,28%) dan sektor perdagangan ditemukan memiliki jumlah penganggur tertinggi. Berdasarkan analisis logistik ditemukan angkatan kerja yang memiliki sertifikat pelatihan, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di pedesaan, dan bermigrasi memiliki probabilitas lebih rendah untuk menganggur selama masa pandemi.

Kata Kunci: pengangguran terdidik; pandemi Covid-19; Sakernas

DOI: 10.47198/naker.v17i1.118

Dikirim: 14-03-2022

Dipublikasikan: 31-05-2022

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia terutama negara berkembang, seperti Indonesia. Menurut Adriani et al., (2019), pembangunan yang baik tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan sebagai aspek penting untuk mewujudkan kualitas manusia melalui karakteristik maupun kepribadian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatur pendidikan sebagai bentuk proses mencerdaskan kehidupan berbangsa. Hal ini sesuai dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 ayat 1, “*setiap warga Negara berhak*

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa, pendidikan adalah salah satu hak yang harus diterima oleh masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan secara adil dan tidak memandang status masyarakat. Pentingnya pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan setiap individu untuk mengembangkan potensi dalam lingkup nilai kemanusiaan (Idrus, 2012). Menurut Adriani et al., (2019) tamatan pendidikan seseorang juga mencerminkan tingkat kemampuan kerja (*the working capacity*) hingga produktivitas di tempat kerja. Gutiérrez-García et al., (2018), juga menyatakan terdapat faktor sosial, seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga menjadi landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan yang dapat digunakan di dunia kerja. Hal ini dikarenakan, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang berbanding lurus dengan kesempatan untuk bekerja.

Jenis pekerjaan yang ada di Indonesia terus berkembang dan membutuhkan lulusan dari pendidikan tinggi, seperti tingkat diploma atau universitas. Salah satu contoh jenis pekerjaan tersebut adalah bidang perkotaan (*white collar*) atau pekerjaan yang bergengsi sehingga membutuhkan orang-orang (tenaga kerja) berkualitas, profesional, dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien (Adriani et al., 2019). Hal ini, secara tidak langsung mendorong masyarakat di Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi hingga perguruan tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020), lulusan perguruan tinggi terus meningkatkan setiap tahun. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa yang diterima juga mengalami peningkatan seiring dengan pembukaan program studi baru yang dibutuhkan di masa depan.

Jumlah mahasiswa pada tahun 2020 yang menempuh pendidikan tinggi pada tingkat diploma dan universitas, dibagi menjadi dua jenis yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pada PTN sebanyak 2.994.015 dan PTS sebanyak 4.374.994 dan diperkirakan terus mengalami peningkatan. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan menjadi *human investment* negara. Hal ini dikarenakan asumsi yang digunakan adalah ketika lulusan perguruan tinggi diikuti dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja formal maka pengangguran dapat dikurangi. Namun, pada faktanya kondisi di lapangan tidak selalu menunjukkan keseimbangan sehingga membawa dampak terjadinya pengangguran. Salah satu masalah yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran terdidik (Sukirno, 2008). Peningkatan jumlah lulusan menyebabkan lahirnya pengangguran terdidik karena tidak diikuti dengan peningkatan lapangan pekerjaan yang tersedia (Kuncoro, 2010).

Pengangguran terdidik didefinisikan sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja, tetapi memiliki gelar minimal di tingkat SMA atau sederajat (Mankiw, 2003). Adanya pengangguran terdidik disebabkan oleh berbagai faktor, tidak hanya jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Pekerja terdidik lebih selektif dalam mencari pekerjaan karena berhubungan dengan minat dan *passion* (Putri, 2015). Selain itu, faktor lainnya adalah adanya kualifikasi tertentu yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi sehingga menimbulkan angka pengangguran yang semakin tinggi (Anjarwati & Juliprijanto, 2021). Oleh karena itu, pengangguran terdidik menjadi pekerjaan rumah dan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Tugas pemerintah untuk menanggulangi jumlah pengangguran terdidik di Indonesia tidak selalu tanpa hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah adanya pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi sejak

kemunculannya pada awal tahun 2020.

Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa sektor yang menopang perekonomian Indonesia mengalami kelumpuhan karena adanya *social distancing*. Pandemi COVID-19 juga berkontribusi dalam meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia, salah satunya dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Aeni, 2021). Coibion et al., (2020) menyatakan bahwa peningkatan pengangguran selama pandemi COVID-19 lebih banyak disebabkan oleh tingginya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dibandingkan pengangguran baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), terjadi peningkatan pengangguran selama pandemi terutama dari sisi pendidikan. Pengangguran terdidik mengalami peningkatan dari 6,69% pada tahun 2020 menjadi 8,55% pada tahun 2021 dari jumlah angkatan kerja dengan tingkat lulusan perguruan tinggi. Pengangguran terdidik diperkirakan mengalami peningkatan karena adanya peralihan dari sektor usaha formal ke sektor informal sehingga komposisi pekerja formal mengalami penurunan dari 43,36% menjadi 40,38% pada periode yang sama.

Keberadaan pengangguran dapat berdampak pada perekonomian sehingga dibutuhkan kebijakan untuk mendorong penurunan jumlah pengangguran. Persistensi pengangguran adalah masalah besar selama bertahun-tahun mengingat implikasinya terhadap ekonomi riil, kesejahteraan umum, desain kebijakan, dan juga relevansi empiris dari dua teori pengangguran utama yang ada. Secara khusus, menurut hipotesis tingkat alamiah (Phelps, 1968; Friedman, 1968), pengangguran harus menjadi proses stasioner dan rata-rata, berbagai model teoritis telah diajukan untuk menjelaskan kemungkinan determinan endogen tingkat pengangguran. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk pada gilirannya pertumbuhan produktivitas (Pissarides, 2000), suku bunga riil (O. J. Blanchard et al., 1992), harga saham (Fitoussi et al., 2000), variabel institusional (Nickell & Van Ours, 2000) atau interaksi antara variabel kelembagaan dan makroekonomi (O. Blanchard & Wolfers, 2000).

Variabel perlu diuji untuk mengkonfirmasi apakah stabilitas pekerjaan meningkat dengan pendidikan karena pekerja yang lebih berpendidikan juga menerima lebih banyak pelatihan di tempat kerja dan dengan demikian mengakumulasi lebih banyak modal manusia yang sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dalam (Cairó & Cajner, 2018).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan mengenai peningkatan jumlah pengangguran terdidik yang terjadi di Indonesia baik sebelum dan sesudah masa pandemi COVID-19, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan pengangguran terdidik di Indonesia berdasarkan provinsi, tingkat pendidikan, alasan berhenti bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan, serta menganalisis probabilitas terjadinya pengangguran terdidik di Indonesia melalui metode regresi logistik.

2. Metode Penelitian

Pertama, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif berupa tabulasi silang. Analisis statistika deskriptif digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul (Ghozali, 2016). Analisis tabulasi silang digunakan untuk mengetahui frekuensi dan persentase sebuah variabel secara deskriptif sehingga maknanya mudah dipahami (Tjiptono & Santoso, 2001). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dikarenakan sesuai dengan tujuan untuk mengetahui seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi pengangguran terdidik atau sebaliknya. Berikut merupakan model regresi logistik dalam penelitian ini.

$$\ln \left(\frac{\text{Pengangguran } i}{1 - \text{Pengangguran } i} \right) = \beta_0 + \beta_1 \text{ pelatihan } i + \beta_2 \text{ usia } i + \beta_3 \text{ jenis kelamin } i + \beta_4 \text{ rural-urban } i + \beta_5 \text{ formal-informal } i + \beta_6 \text{ migrasi } i \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan model di atas maka selanjutnya dilakukan penafsiran dengan menghitung nilai antilog setiap koefisien atau dikenal dengan *odds ratio*, antara lain.

$$\text{Odds Ratio Model 1} = \frac{\text{Pengangguran } i}{1 - \text{Pengangguran } i} \quad (2)$$

Selanjutnya, adanya koefisien hasil estimasi regresi logistik maka dapat dihitung jumlah peluang seseorang untuk menjadi pengangguran terdidik berdasarkan rumus di bawah ini.

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Y_i}} \quad \Big| \quad P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} \quad (3)$$

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengangguran Terdidik pada Masa pandemi

Sesuai dengan tujuan penelitian, bagian ini akan menggambarkan kondisi pengangguran terdidik di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan sebarannya di setiap provinsi, serta berdasarkan kondisi individu seperti tingkat pendidikan, alasan berhenti atau sementara berhenti bekerja, lapangan usaha tempat bekerja sebelumnya, dan status pekerjaan pada pekerjaan sebelumnya. Deskripsi masing-masing kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Menurut Provinsi

Berdasarkan analisis pada data Sakernas 2020, dapat diketahui bahwa pengangguran terdidik tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk pada masa pandemi. Peta pada gambar 1 mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam 4 (empat) rentang angka pengangguran terdidik berdasarkan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata keseluruhan provinsi, yaitu 1) rentang 18,02 – 22,15%; 2) rentang 22,16% - 26,29%; 3) rentang 26,30% - 30,43%; dan 4) rentang 30,44% - 34,57.



Gambar 1. Pengangguran Terdidik Menurut Provinsi

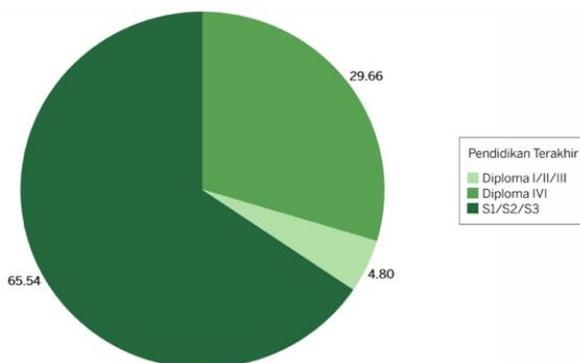
Berdasarkan data Sakernas 2020, jumlah pengangguran terdidik di Indonesia adalah 20.354 orang, dibandingkan pekerja terdidik sebanyak 58.285 orang. Secara rata-rata, tingkat pengangguran terdidik 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020 adalah 24,9% dari total angkatan kerja terdidik. Pada periode ini diketahui sebanyak 16 provinsi memiliki tingkat pengangguran terdidik di atas rata-rata nasional, sedangkan 18 provinsi lainnya di bawah rata-rata. Provinsi dengan tingkat pengangguran terdidik tertinggi pada tahun 2020 adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu

32,0% dari total angkatan kerja terdidik, sedangkan yang terendah berada pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat pengangguran terdidik 18,0%.

Jumlah penduduk yang besar di Provinsi Jawa Barat (49,56 juta jiwa pada 2020) dengan persentase penduduk perkotaan yang tinggi (78,7%), adanya pandemi Covid-19 yang berdampak secara signifikan terhadap sektor formal ketenagakerjaan dan menciptakan pengangguran terdidik yang umumnya bekerja di sektor formal. Sebaliknya, persentase penduduk perkotaan di Kalimantan Tengah pada tahun yang sama adalah 40,2%. Dari total 2,68 juta penduduk, sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan dengan dominasi aktivitas ekonomi di sektor pertanian, yang relatif tidak lebih rentan pada disrupsi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

3.1.2. Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan angkatan kerja, data Sakernas 2020 tidak mengklasifikasikan masing-masing jenjang D1 hingga D3, serta S1 hingga S3, sehingga hal ini menjadi keterbatasan dalam mendeskripsikan pengangguran terdidik berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh.

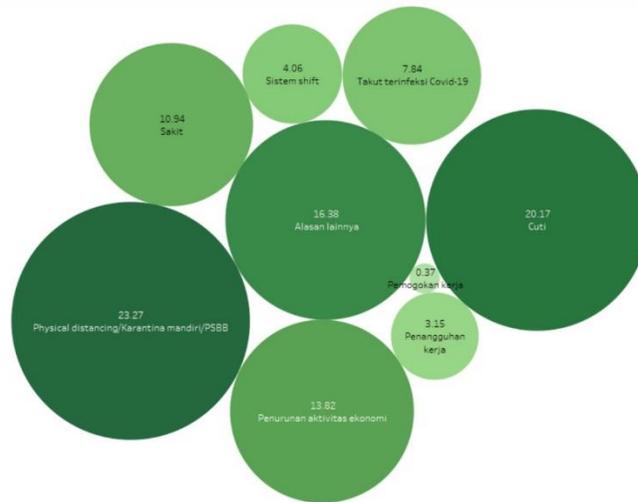


Gambar 2. Pengangguran Terdidik Menurut Tingkat Pendidikan

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terdidik pada masa pandemi didominasi lulusan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2-S3), yaitu 65,54%. Selanjutnya sebanyak 29,66% dari total angkatan kerja lulusan Diploma 1-3 diketahui menganggur selama masa pandemi, sedangkan lulusan Diploma 4 sebanyak 4,80%.

3.1.3. Menurut Alasan Berhenti/Sementara Berhenti Bekerja

Dalam Sakernas 2020 dijabarkan alasan penganggur terdidik saat berhenti atau sementara berhenti bekerja, baik alasan yang terkait pandemi seperti physical distancing, karantina mandiri, PSBB, serta alasan takut terinfeksi Covid-19, alasan personal seperti sakit, cuti, dan pemogokan kerja, serta alasan kondisi perusahaan seperti sistem shift, penangguhan kerja, dan penurunan aktivitas ekonomi.

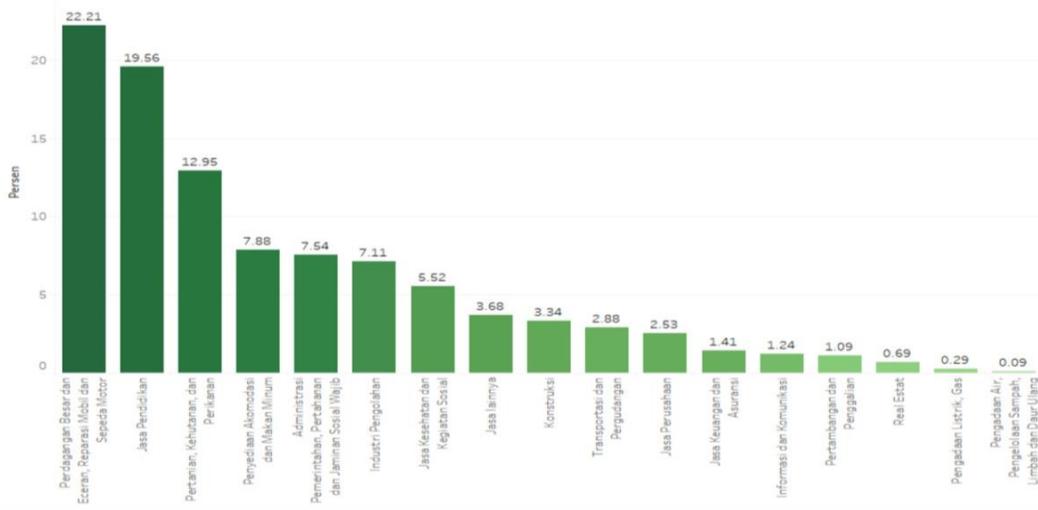


Gambar 3. Pengangguran Terdidik Menurut Alasan Berhenti/Sementara Berhenti Bekerja

Dari hasil analisis diketahui bahwa alasan physical distancing, karantina mandiri, PSBB menjadi alasan tertinggi bagi para penganggur terdidik untuk berhenti/ sementara berhenti bekerja (23,27%), disusul alasan cuti sebanyak 20,17%.

3.1.4. Menurut Lapangan Usaha

Analisis selanjutnya dilakukan pada lapangan usaha terakhir sebelum angkatan kerja terdidik menjadi penganggur pada 2020. Lapangan usaha terbagi ke dalam 17 kategori sebagaimana dijabarkan pada gambar 4.

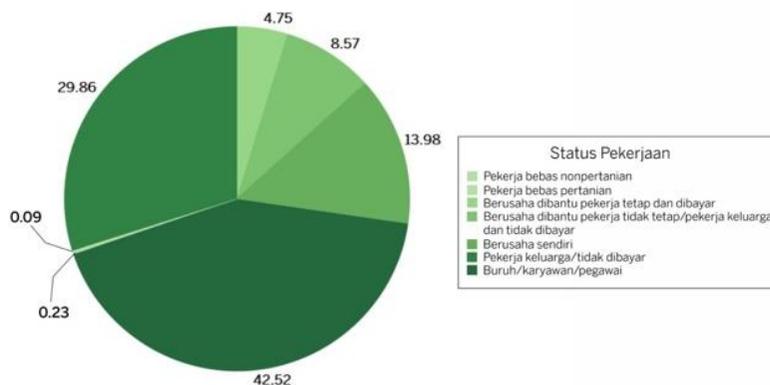


Gambar 4. Pengangguran Terdidik Menurut Lapangan Usaha pada Pekerjaan Sebelumnya

Gambar 4 menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha dengan penganggur terdidik yang paling banyak (22,21%). Lapangan usaha tertinggi kedua adalah jasa pendidikan (19,56%) dan pertanian, kehutanan, dan perikanan (12,95%).

3.1.5. Menurut Status Pekerjaan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan status pekerjaan berdasarkan 7 (tujuh) kategori, yaitu: 1) Berusaha sendiri; 2) Berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga dan tidak dibayar; 3) Berusaha sendiri dibantu pekerja tetap dan dibayar; 4) Buruh/karyawan/pegawai; 5) Pekerja bebas di pertanian; 6) Pekerja bebas di nonpertanian; dan 7) Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.



Gambar 5 Pengangguran Terdidik Menurut Status Pekerjaan Sebelumnya

Berdasarkan 7 (tujuh) kategori status pekerjaan, pengangguran terdidik di Indonesia paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan sebelumnya (42,52%). Kategori status pekerjaan terbanyak kedua adalah pekerja keluarga/tidak dibayar (29,86%), disusul oleh kategori berusaha sendiri (13,98%), kemudian berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga dan tidak dibayar (8,57%) dan berusaha sendiri dibantu pekerja tetap dan dibayar (4,75%). Kategori pekerja bebas relatif paling sedikit memiliki pengangguran terdidik, yaitu masing-masing 0,23% pada pekerja bebas di nonpertanian dan hanya 0,09% pada pekerja bebas di pertanian.

3.2. Hasil Estimasi Logistik pada Pengangguran Terdidik

Regresi logistik digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua, yaitu menganalisis kecenderungan lulusan pendidikan tinggi untuk menganggur selama masa pandemi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel *dummy* menganggur dan bekerja, sedangkan variabel independen penelitian terdiri dari pelatihan, usia, jenis kelamin, *dummy* rural-urban, *dummy* pekerjaan formal-informal, dan *dummy* migrasi-tidak migrasi. Hasil estimasi regresi logistik dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Logistik

Independent variables	β	S.E.	Odds ratio	Prob	Exp (β)	95% C.I. for Exp (β)	
						Lower	Upper
Pelatihan	-0,031	0,036	0,968	0,384	-0,87	-0,103	0,039
Usia	0,138	0,001	1,013	0,000	8,41	0,010	0,017
Jenis Kelamin	-0,330	0,036	0,718	0,000	-9,01	-0,402	-0,258
Rural-Urban	-0,020	0,036	0,979	0,581	-0,55	-0,092	0,051

Formal-Informal	1,686	0,036	5,400	0,000	45,88	1,614	1,758
Migrasi	-0,373	0,057	0,688	0,000	-6,47	-0,486	-0,259
Konstanta	1,818	0,095	6,165	0,000	19,14	1,632	2,005
Pseudo R ²	0,0852						
Prob Chi ²	0,0000						
Jumlah observasi	61.779						

note: significance level ***1%, **5%, *10%

Sumber : Estimasi Data (2022)

Berdasarkan hasil estimasi melalui regresi logistik dapat diketahui bahwa usia dan variabel formal-informal berpengaruh positif signifikan terhadap status angkatan kerja terdidik untuk menjadi pengangguran terdidik pada saat pandemi COVID-19. Sedangkan, jenis kelamin dan faktor untuk melakukan migrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan angkatan kerja untuk menjadi pengangguran terdidik. Selanjutnya, di lain sisi variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah adanya pelatihan dan faktor tempat, seperti rural ataupun urban. Namun, secara keseluruhan berdasarkan nilai Prob Chi² dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan pada kemungkinan menjadi penganggur terdidik ketika pandemi COVID-19. Nilai Pseudo R² menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah 0,0852, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Penggunaan regresi logistik seringkali menghasilkan nilai R² yang rendah, hal ini disebabkan oleh terbatasnya variasi data pada variabel terikat yaitu antara 0 dan 1.

Variabel yang menunjukkan pengaruh positif signifikan, seperti usia dan pekerjaan di sektor formal maupun informal. Pada variabel usia menunjukkan bahwa peluang angkatan kerja terdidik untuk menjadi pengangguran pada masa COVID-19 adalah sebesar 1,013 kali lebih besar bagi usia yang lebih tua. Selain itu, variabel bebas yang menunjukkan adanya angkatan kerja yang bekerja di sektor formal maupun informal memiliki odds ratio sebesar 5,400 kali lebih besar kecenderungan untuk menjadi pengangguran terdidik berasal dari sektor informal. Sedangkan, variabel yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan adalah jenis kelamin, tempat yang termasuk wilayah rural dan urban hingga migrasi yang pernah dilakukan. Pada jenis kelamin menunjukkan *odds ratio* 0,718 kali artinya angkatan kerja laki-laki memiliki kecenderungan untuk menjadi pengangguran terdidik lebih besar daripada perempuan. Pada wilayah rural maupun urban menunjukkan odds ratio 0,979 kali yang artinya angkatan kerja yang berasal dari wilayah rural memiliki kecenderungan untuk menjadi pengangguran terdidik lebih besar daripada yang berada di perkotaan. Selain itu, variabel migrasi juga menunjukkan *odds ratio* sebesar 0,688 kali sehingga angkatan kerja yang melakukan migrasi memiliki kecenderungan untuk tidak menjadi pengangguran terdidik lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat diketahui bahwa pengangguran terdidik pada masa pandemi COVID-19 terbukti dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti usia angkatan kerja, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan di sektor formal maupun informal hingga adanya migrasi yang dilakukan. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian Moeis (1992), mengenai penerapan *search theory* pada tenaga kerja terdidik di Indonesia bahwa lulusan pendidikan tinggi memiliki probabilitas untuk menganggur lebih tinggi. Sedangkan, pada masa pandemi COVID-19 peningkatan pengangguran terdidik telah diprediksi oleh World Bank. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, bahwa terdapat pengaruh signifikan antara jenis kelamin, variabel umur hingga status perkawinan terhadap pengangguran terdidik (Wahyuni, 2018).

Pada usia tenaga kerja yang berumur lebih muda memiliki persentase lebih sedikit untuk menjadi pengangguran terdidik dikarenakan mayoritas pekerjaan yang dipilih sesuai dengan keunggulan yang dimiliki sehingga untuk kemungkinan terjadinya PHK dapat diminimalisir.

Meskipun di lain sisi, tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menganggur dikarenakan adanya penyesuaian dan sikap selektif dalam memilih pekerjaan (Arrozi & Sutrisna, 2018). Hal ini berbeda dengan pernyataan bahwa seharusnya tenaga kerja yang berumur lebih tua memiliki kecenderungan untuk menjadi pengangguran terdidik lebih kecil karena memiliki tanggung jawab secara materiil terhadap keluarganya. Namun, pada faktanya kualifikasi permintaan tenaga kerja oleh beberapa perusahaan bersifat dinamis dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih muda dan mengikuti perkembangan zaman. Pengaruh positif dan signifikan antara umur dan pengangguran terdidik juga diperkuat dengan Najooan (2018) pada titik umur tertentu peluang mendapatkan pekerjaan akan mengalami penurunan. Lumapelumey (2019) probabilitas umur tenaga kerja yang semakin tua maka kecenderungan untuk menjadi pengangguran lebih tinggi karena adanya persaingan dengan lulusan perguruan tinggi yang baru.

Variabel selanjutnya yang berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik adalah jenis kelamin tenaga kerja, dengan kecenderungan perempuan lebih rentan mengalami pengangguran terdidik selama pandemi. Hasil ini mendukung penelitian, Marchang (2019) di India, bahwa masalah pengangguran lebih parah di perkotaan daripada di pedesaan dan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Jenis kelamin menjadi salah satu penentu di pasar tenaga kerja karena masih terdapat stereotip bahwa laki-laki memiliki fisik lebih kuat dan aman untuk bekerja di bawah tekanan (Ritonga, 2019). Namun, perkembangan zaman dan peningkatan lulusan perguruan tinggi menyebabkan stigma mengenai ketimpangan antara pekerja laki-laki dan perempuan mengalami penurunan. Hardiyanti et al., (2019), mengkaji bahwa pada era ini peran ganda perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga pekerja di pasar tenaga kerja menunjukkan efektif untuk berkontribusi terhadap perekonomian. Hal ini juga sejalan dengan pengaturan hak-hak perempuan di lingkungan kerja. Hak-hak pekerja perempuan telah dijamin dalam undang-undang dan beberapa peraturan lainnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak pekerja perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Persyaratan Persyaratan Kerja Malam dan tata cara mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Oleh karena itu, partisipasi tenaga kerja perempuan di pasar tenaga kerja bukan lagi menjadi sesuatu hal yang dianggap tabu. Namun, peran perempuan yang cenderung tetap bekerja pada saat pandemi COVID-19 atau memiliki kecenderungan lebih rendah untuk menjadi pengangguran (Ngadi, 2020). Pernyataan ini berbeda dengan hasil penelitian karena menggunakan studi kasus dalam tenaga kerja perkebunan yang terbukti tidak berdampak besar ketika pandemic COVID-19.

Selanjutnya, pengangguran terdidik juga disebabkan karena adanya peningkatan partisipasi kerja pada sektor informal. Krisnandika et al., (2021), menyatakan bahwa adanya dorongan untuk melakukan work from home menyebabkan kelumpuhan di beberapa sektor informal. Hal ini dikarenakan selama ini sektor informal cenderung membutuhkan pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli secara langsung, berbeda dengan sistem kerja sektor formal pada umumnya. Adanya kecenderungan pengangguran terdidik yang lebih tinggi di sektor informal juga menjadi alasan untuk melakukan migrasi guna mencari pekerjaan. Namun, hal ini yang mendorong terjadinya peningkatan angka pengangguran terdidik di wilayah tujuan migrasi terutama perkotaan (Pratomo, 2017). Meskipun sektor informal nampaknya lebih tahan terhadap krisis, termasuk saat pandemi, kapasitas sektor informal untuk beberapa kota telah menurun, misalnya Jakarta. Jika kapasitas sektor informal sudah jenuh, maka kemungkinan pengangguran terbuka di masa depan menjadi lebih besar. Tingginya angka pengangguran terbuka, salah satunya

disumbang oleh pengangguran terdidik (Puspajuita, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik pada masa pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan dapat diketahui bahwa pengangguran masih menjadi masalah besar di Indonesia.

Hal ini dikarenakan, sejalan dengan teori Adam Smith bahwa keberadaan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menentukan kemakmuran bangsa. Literatyr menyatakan, dalam kasus tertentu meningkatnya pengangguran kaum terpelajar telah melemahkan kemauan Negara dalam mendanai pendidikan. Sering ditanyakan apakah ada gunanya pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk pendidikan, yang hanya mengarah pada pengangguran yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa Negara daripada membelanjakan pendidikan sekarang harus berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan produktif, yang dapat menghasilkan penciptaan lapangan kerja (Akhtar, 2019). Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi sudah saatnya tidak hanya fokus pada meningkatkan pertumbuhan saja (pro growth), tetapi memperhatikan permasalahan dalam negara berkembang. Pembangunan ekonomi harus didefinisikan sebagai upaya dalam mengurangi adanya tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang terjadi di negara berkembang (Todaro, Michael P. dan Smith, 2011). Apabila pengangguran pada masa pandemi COVID-19 lebih banyak terjadi di sektor informal maka dibutuhkan perhatian khusus untuk terus menjaga eksistensi dan keberadaan sektor ini, seperti bantuan dalam hal pembinaan hingga permodalan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa selama masa pandemi Covid-19, terjadi pengangguran terdidik di seluruh provinsi di Indonesia dengan rata-rata 24,9% dari total angkatan kerja terdidik di masing-masing provinsi. Ditemukan pula penganggur dengan pendidikan S1-S3 berjumlah lebih tinggi (65,54%) dibandingkan lulusan Diploma 1-4 (34,46%). Alasan berhenti bekerja didominasi oleh alasan dampak pandemi (23,28%) dan sektor perdagangan ditemukan memiliki jumlah penganggur tertinggi. Berdasarkan analisis logistik ditemukan angkatan kerja yang memiliki sertifikat pelatihan, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di pedesaan, dan bermigrasi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk menganggur selama masa pandemi, sedangkan usia yang lebih tua dan sektor formal meningkatkan kecenderungan menganggur.

Daftar Pustaka

- Adriani, D., Hamzah, N., & Zakaria, J. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terdidik. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 2(3), 1-17.
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17-34.
- Akhtar, S. (2019). Educated Unemployment: A Case of Kerala. *International Journal of Education for the 21st Century*, 1, 93-120.
- Anjarwati, L., & Juliprijanto, W. (2021). Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 178-187.
- Arrozi, F., & Sutrisna, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 7(12), 2732-2763.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Peningkatan Pengangguran 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>

- Blanchard, O. J., Katz, L. F., Hall, R. E., & Eichengreen, B. (1992). Regional evolutions. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1992(1), 1-75.
- Blanchard, O., & Wolfers, J. (2000). The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence. *The Economic Journal*, 110(462), C1-C33.
- Cairó, I., & Cajner, T. (2018). Human capital and unemployment dynamics: Why more educated workers enjoy greater employment stability. *The Economic Journal*, 128(609), 652-682.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020). Labor markets during the COVID-19 crisis: A preliminary view. *National Bureau of economic research*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi*.
- Fitoussi, J.-P., Jestaz, D., Phelps, E. S., Zoega, G., Blanchard, O., & Sims, C. A. (2000). Roots of the recent recoveries: labor reforms or private sector forces? *Brookings Papers on Economic Activity*, 2000(1), 237-311.
- Friedman, M. (1968). *The Role of Monetary Policy* *The American Economic Review*. New York, 58.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 96.
- Gutiérrez-García, R. A., Benjet, C., Borges, G., Méndez Ríos, E., & Medina-Mora, M. E. (2018). Emerging adults not in education, employment or training (NEET): socio-demographic characteristics, mental health and reasons for being NEET. *BMC Public Health*, 18(1), 1-11.
- Hardiyanti, E. P., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Peran Ganda Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Disungai Musi Sumatera Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1549-1555.
- Idrus, M. (2012). Pendidikan karakter pada keluarga Jawa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2.
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- Kuncoro, M. (2010). Masalah, kebijakan, dan Adriani, D., Hamzah, N., & Zakaria, J. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terdidik. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 2(3), 1-17.
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17-34.
- Akhtar, S. (2019). Educated Unemployment: A Case of Kerala. *International Journal of Education for the 21st Century*, 1, 93-120.
- Anjarwati, L., & Juliprijanto, W. (2021). Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 178-187.
- Arrozi, F., & Sutrisna, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 7(12), 2732-2763.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Peningkatan Pengangguran 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>
- Blanchard, O. J., Katz, L. F., Hall, R. E., & Eichengreen, B. (1992). Regional evolutions. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1992(1), 1-75.

- Blanchard, O., & Wolfers, J. (2000). The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence. *The Economic Journal*, 110(462), C1–C33.
- Cairó, I., & Cajner, T. (2018). Human capital and unemployment dynamics: Why more educated workers enjoy greater employment stability. *The Economic Journal*, 128(609), 652–682.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020). Labor markets during the COVID-19 crisis: A preliminary view. National Bureau of economic research.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi.
- Fitoussi, J.-P., Jestaz, D., Phelps, E. S., Zoega, G., Blanchard, O., & Sims, C. A. (2000). Roots of the recent recoveries: labor reforms or private sector forces? *Brookings Papers on Economic Activity*, 2000(1), 237–311.
- Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy *The American Economic Review*. New York, 58.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 96.
- Gutiérrez-García, R. A., Benjet, C., Borges, G., Méndez Ríos, E., & Medina-Mora, M. E. (2018). Emerging adults not in education, employment or training (NEET): socio-demographic characteristics, mental health and reasons for being NEET. *BMC Public Health*, 18(1), 1–11.
- Hardiyanti, E. P., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Peran Ganda Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Disungai Musi Sumatera Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1549–1555.
- Idrus, M. (2012). Pendidikan karakter pada keluarga Jawa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2.
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- Kuncoro, M. (2010). Masalah, kebijakan, dan politik ekonomika pembangunan.
- Lumapelumey, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Ambon. *Cita Ekonomika*, 13(2), 131–142.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi*. Erlangga.
- Marchang, R. (2019). Youth and Educated Unemployment in North East India. *IASSI Quarterly*, 38(4).
- Moeis, J. R. (1992). Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Indonesia: Penerapan Search Theory. *Economics and Finance in Indonesia*, 40, 107–134.
- Najoan, P. W. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Pekerjaan Terhadap Tenaga Kerja Terdidik Di Indonesia 2016. Universitas Brawijaya.
- Ngadi, D. K. K. (2020). *Emas Hijau Di Sumatera Selatan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nickell, S., & Van Ours, J. (2000). Why has unemployment in the Netherlands and the United Kingdom fallen so much? *Canadian Public Policy/Analyse de Politiques*, S201–S220.
- Phelps, E. S. (1968). Money-wage dynamics and labor-market equilibrium. *Journal of Political Economy*, 76(4, Part 2), 678–711.
- Pissarides, C. A. (2000). *Equilibrium unemployment theory*. MIT press.
- Pratomo, D. S. (2017). *Fenomena pengangguran terdidik di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Puspadjuita, E. A. (2018). Factors that influence the rate of unemployment in Indonesia. *Interational Journal of Economics and Finance*, 10, 140–147.
- Putri, R. F. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 175–181.
- Ritonga, W. D. (2019). Hubungan Penerimaan Jenis Kelamin Anak Dengan Depresi Postpartum Pada Suku Batak Toba Di Wilayah Kerja Puskesmas Namorambe Tahun 2018.
- Sukirno, S. (2008). *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, F., & Santoso, S. (2001). *Riset Pemasaran: Konsep Dalam Aplikasi SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- Todaro, Michael P. dan Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Wahyuni, Y. S. (2018). *Analisis Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Sumatera Barat 2007*.